



Model Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Tengah

PMKS Handling Model in Central Java

Septina Dwi Retnandari¹⁾

Susanti²⁾

Masriah³⁾

Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Jl. Pawiyatan Luhur I /1 Bendan Duwur
Semarang 50233.

Email : septina@polimarin.ac.id¹⁾

susanti@polimarin.ac.id²⁾

masriah@polimarin.ac.id³⁾

Korespondensi penulis: septina@polimarin.ac.id¹⁾

Abstract.

Research on the Model of Handling People with Social Welfare Problems (PMKS) in Central Java began with data on the worsening condition of PMKS residents, especially during the corona covid in 2019. The need to produce a handling model is different in each region. Through the FGD, SWOT and handling models for PMKS were discussed. The weakness of the poor is that it is difficult to free from poor culture and always have 'no freedom for poor'. The potential for abandoned toddlers is if they are in an orphanage because they are easier to control. The obstacle for abandoned children under five is that many have not been reached by children's social services. The weakness of abandoned children is to behave anormatively, indifferent, suspicious of people who are not from their group and unruly, wild, reactive, sensitive and free to do anything such as sexuality. The weakness of the elderly is the lack of suitable jobs for the elderly who have physical potential. The obstacle of homelessness is that there are residents who invite 'sprawl' in the city. The potential for disability is still having the motivation to be responsible independently. The weakness of street children is that they are vulnerable to economic exploitation, physical, social and sexual violence. The models chosen were the 'self advocacy and empowering' model, the 'Community Based Information Network' model, and the Public Partnership Centre model. The process of handling FMD by means of rehabilitation, advocacy / consultation, social guidance and social psychology.

Keywords: *PMKS, Handling model*

Abstrak.

Penelitian mengenai Model Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Tengah berawal dari data makin buruknya kondisi warga PMKS terutama di masa covid corona di tahun 2019. Kebutuhan untuk menghasilkan model

penanganan berbeda di tiap daerah. Melalui FGD didiskusikan mengenai SWOT dan model penanganan PMKS. Kelemahan fakir miskin adalah sulit membebaskan dari budaya miskin serta senantiasa mempunyai 'no freedom for poor'. Potensi anak balita terlantar adalah jika mereka ada di panti karena mereka lebih mudah dikontrol. Kendala anak balita terlantar adalah banyak yang belum terjangkau oleh layanan sosial anak. Kelemahan anak terlantar adalah berperilaku anormatif, acuh, pencuriga pada orang yang bukan dari kelompoknya dan susah diatur, liar, reaktif, sensitif dan bebas melakukan apa saja seperti seksualitas. Kelemahan lanjut usia adalah sedikitnya lapangan pekerjaan yang sesuai bagi lansia yang berpotensi secara fisik. Kendala gelandangan adalah adanya warga yang mengajak meng 'gepeng' di kota. Potensi disabilitas adalah masih memiliki motivasi bertanggungjawab secara mandiri. Kelemahan anak jalanan adalah rentan terhadap eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik, sosial dan seks. Model yang dipilih adalah model 'self advocacy and empowering, model 'Community Based Information Network', dan model *Public Partnership Centre* . Proses penanganan PMKS dengan cara rehabilitasi, advokasi/konsultasi, bimbingan sosial dan psikologi sosial.

Kata kunci: PMKS, Model, Penanganan

LATAR BELAKANG

Masalah yang ada pada warga dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) masih banyak mewarnai potret masalah sosial di negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Hasil pendataan tahun 2020 di Jawa Tengah terdapat sejumlah 4.056.054 PMKS yang berarti ada kenaikan sejumlah 1.014.024 dibanding tahun 2019 yang berjumlah 3.042.030. Kenaikan ini terjadi karena dampak munculnya wabah virus corona pada tahun 2020, sehingga meningkatkan angka kemiskinan dan juga permasalahan sosial lainnya.

Jawa Tengah sebagai provinsi yang berukuran besar di Indonesia memiliki persoalan serius dengan pembangunan kesejahteraan sosial ini. Jumlah fakir miskin Jawa Tengah sebanyak 12,74 persen tergolong persentase yang besar karena akan memberi dampak bagi tingkat sosial ekonomi Jawa Tengah. Tahun 2021, kondisi PMKS Provinsi Jawa Tengah buruk pada warga fakir miskin, penyandang disabilitas dan perempuan rawan sosial ekonomi.

Angka-angka ini semakin menunjukkan semakin nampak kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyak permasalahan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial melalui perlu terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai



dengan Undang Undang nomor 11 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu disusun perencanaan pengembangan jaminan sosial dengan menjabarkan konsep kesejahteraan sosial yang tepat bagi masyarakat khususnya yang tergolong PMKS.

Berdasarkan laporan tahunan BPS tahun 2021 diperoleh data jumlah terbesar dari masalah PPKS di Jawa Tengah adalah Fakir Miskin yaitu berjumlah 4.297.436 orang, diikuti oleh penyandang disabilitas sejumlah 127.854 orang dan urutan ke-3 terbesar adalah perempuan dengan rawan sosial ekonomi sebesar 98.580 orang. Kemudian masalah PPKS yang terkecil jumlahnya adalah komunitas adat terpencil yaitu sebanyak 74 orang dan korban trafficking sebanyak 71 orang. Selanjutnya jumlah perempuan yang lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki ada pada jenis PMKS lanjut usia terlantar, tuna susila, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS). Secara khusus, pada PMKS terkuak jumlah perempuan yang rawan dengan kondisi sosial dan ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model penanganan PMKS Provinsi Jawa Tengah menemukan model penanganan PMKS di Jawa Tengah. Untuk manfaat penelitian adalah sebagai bahan masukan untuk perencanaan sistem jaminan kesejahteraan sosial masyarakat di Jawa Tengah, khususnya yang termasuk dalam PMKS. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penetapan strategi penanganan PMKS di Jawa Tengah dan dalam melakukan proyeksi kebutuhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Jawa Tengah.

KAJIAN TEORITIS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Untuk melihat keberhasilan dalam penanganan PMKS dapat ditentukan indikator bagi PMKS yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, keberfungsian sosial, kemandirian; bagi

komunitas yaitu menurunnya gangguan sosial, meningkatnya ketahanan sosial masyarakat, meningkatnya kemampuan *problem solving* masyarakat; bagi pemerintah yaitu menurunnya jumlah PMKS, berhasilnya program pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan PMKS dan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.

Penelitian mengenai PMKS dan penanganannya banyak dilakukan. Selama ini penelitian dilakukan berdasarkan kondisi yang ada di kota besar di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan yang ada di masing-masing daerah/kota, yaitu dengan melihat kondisi SDM dan ketersediaan jaringan, sarana dan prasarana serta program yang ada pada pemerintah daerah. Sebuah penelitian kuantitatif di Makasar (Rasyid et al., 2018) yang melibatkan 100 kepala keluarga miskin sebagai responden menunjukkan bahwa usia dan pendidikan tingkat kepala keluarga mempengaruhi pendapatan keluarga. Alternatif terbaik untuk penanganan yang buruk (low income) keluarga di Kota Makassar melalui peningkatan akses ekonomi dan pengetahuan serta keterampilan berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Di sini variabel yang menentukan kondisi berdayanya warga miskin adalah pengetahuan atau ketrampilan. Dengan ke 2 variabel tersebut akan mendorong hadirnya pekerjaan yang menghasilkan pendapatan.

Masalah sosial identik dengan masalah kemiskinan. Sebuah penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda dilakukan oleh Maria Cancian and Deborah Reed (Danziger & Haveman, 2000) Pada penelitian ini dikatakan bahwa kehadiran orang yang lebih dewasa, misalnya, kakek-nenek yang tentunya berada di rumah, akan meningkatkan sumber daya keuangan dan sosial untuk keluarga rentan dengan memberikan tambahan pendapatan. Dalam menentukan status kemiskinan, misalnya pada statistik kemiskinan resmi, dibutuhkan dukungan pendapatan dan kebutuhan “orang dewasa terkait” saja; mereka mengabaikan kebutuhan hidup bersama yang dianggap “tidak terkait”. Di jurnal yang sama pada penelitian yang dilakukan oleh Lynn Karoly (Danziger dan Haverman, 2000, hal 40) menyimpulkan bahwa tampaknya ada keseragaman yang lebih besar dalam pekerjaan dan efek ekonomi dari program pendidikan. Sebagian besar dari warga miskin meningkatkan penghasilan dan kesejahteraannya pada tahun-tahun peserta mengikuti program. Artinya investasi melalui program pendidikan memberi efek pada peningkatan pendapatan. Berikut ini adalah gambaran tentang penelitian terdahulu yang meneliti tentang PMKS di berbagai kota di Indonesia.



Secara garis besar, dari berbagai penelitian terdahulu memakai tipe penelitian deskriptif dan sumber datanya berasal dari 2 pihak yaitu penerima manfaat program PMKS dan dari pemerintah sebagai pelaksana program. Pada penelitian tentang PMKS di Jawa Tengah diterapkan tipe dan sumber yang sama, namun penelitian ini berawal dari penyusunan analisa 4 faktor yaitu kekuatan, kelemahan, potensi dan ancaman dari tiap kelompok jenis PMKS dengan pertimbangan jika melihat kondisi 4 faktor tersebut akan bisa membidik strategi yang tepat berdasarkan kondisi masing-masing jenis PMKS.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini memberi gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti, artinya objek yang diteliti tidak dimanipulasi. Ruang lingkup substansial pada penelitian ini adalah data PMKS Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dokumen pelaksanaan PMKS dari berbagai kota di Jawa Tengah dan data sekunder yang diperoleh dari para pemangku kepentingan dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan dari perguruan tinggi. Teknik pengambilan datanya melalui studi dokumentasi, wawancara dan FGD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif juga analisis terhadap potensi, kelemahan / permasalahan, peluang dan solusi (analisis terhadap *Strenght, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) terhadap 13 (tiga belas) isu kesejahteraan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisa kekuatan, kelemahan, potensi dan ancaman melalui pelaksanaan diskusi terbatas (FGD) dihasilkan informasi berikut.

Tabel 1. Potensi dan Kelemahan Isu Kesejahteraan Sosial

Fakir Miskin	
Potensi	a. Memiliki solidaritas sosial yang tinggi b. Memiliki mobilitas yang tinggi c. Memiliki keuletan d. Memiliki orientasi masa depan yang cukup kuat.

Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (<i>basic need deprivation</i>). b. Tak mampu melakukan kegiatan usaha produktif (<i>unproductiveness</i>). c. Tak mampu menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (<i>inaccessibility</i>). d. Tak mampu menentukan nasibnya diri sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (<i>vulnerability</i>); Tak mampu membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (<i>no freedom for poor</i>).
Anak Balita Terlantar	
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Secara sosial bayi tidak mampu untuk menolong diri sendiri b. Bayi memiliki fisik yang rentan pada saat harus menyesuaikan dengan lingkungannya.
Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya jumlah balita yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan sosial anak. b. Terbatasnya campur cakupan program untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang jumlahnya besar. c. Belum optimalnya kerjasama antara lembaga-lembaga yang menangani anak balita terlantar. d. Belum adanya program yang terencana, terpadu dan berkelanjutan yang menjangkau sasaran dengan lebih adil dan merata melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB) e. Kesulitan pemerintah untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terkini tentang jumlah anak, lokasi dan karakteristik penyandang masalah. Kelalaian dan ketidakmampuan orang tua / keluarga melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar.
Anak Terlantar	
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Anak lebih mudah diarahkan pada usia dini. b. Secara emosional, anak berada dalam tahap belajar mengelola emosi agar tidak mudah marah, belajar untuk berpisah dari orang tua ataupun lingkungan rumah.
Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki perilaku yang dinilai menyimpang dari norma umum yang berlaku di masyarakat. b. Baik secara pribadi maupun kelompok mereka berupaya mengembangkan sub kultur dengan norma dan nilai yang berbeda dari yang berlaku secara umum. c. Berperilaku sosial yang anormatif, acuh tak acuh, curiga pada orang lain yang bukan dari kelompoknya. d. Memiliki sifat-sifat susah diatur, liar, reaktif, sensitif dan bebas melakukan apa saja seperti seksualitas dan sebagainya.



Usia Lanjut	
Potensi	a. Bagi usia lanjut yang masih potensial, mereka masih dapat diberi kesempatan untuk bekerja dengan diberi ketrampilan. b. Memiliki banyak waktu luang c. Secara medis apabila mereka diberi ketrampilan / kegiatan akan menghambat masa usia pikun dan dapat dijadikan sebagai aktivitas berolahraga.
Kelemahan	a. Keterbatasan secara mental, sosial dan psikologis b. Karena kelemahannya secara fisik, maka usia lanjut tidak potensial dan menjadi beban bagi keluarga atau masyarakat. c. Keterbatasan secara mental, sosial dan psikologis. d. Keterbatasan secara mental, sosial dan psikologis e. Karena kelemahannya secara fisik, maka usia lanjut tidak potensial dan menjadi beban bagi keluarga atau masyarakat.
Gelandangan, Pengemis dan Pemulung	
Potensi	a. Adanya keinginan untuk berhenti melakukan kegiatan 'gepeng' bila ada alternatif pekerjaan di desa. b. 'Gepeng' memiliki etos kerja yang tinggi untuk memperbaiki kualitas hidupnya (pasrah menghadapi kenyataan hidup yang sulit akibat kondisi alam kering dan tandus). c. Memiliki rasa malu dan harga diri akan pekerjaan yang dilakukan. d. Memiliki kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
Kelemahan	a. Gelandangan dan pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti: kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat. b. Gelandangan dan pengemis dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan, dan konstruksi masyarakat kota. c. Gelandangan dan pengemis, tidak hanya menghadapi kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota. Komunitas gelandangan dan pengemis harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya.
Penyandang Cacat	
Potensi	a. Penyandang cacat masih memiliki motivasi untuk bertanggungjawab secara mandiri. b. Banyak dijumpai penyandang cacat yang memiliki kelebihan khusus dibandingkan dengan orang normal pada umumnya. Karena keterbatasannya, penyandang cacat bisa memfungsikan anggota tubuhnya yang normal untuk menjalankan aktivitas, dan sebaliknya juga mereka bisa tetap melanjutkan fungsi dari anggota tubuhnya yang cacat.

Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pandangan masyarakat yang menganggap penyandang cacat sebagai orang yang tidak potensial dan menjadi beban. b. Sebagian penyandang cacat yang memiliki sifat kurang percaya diri dan menarik diri dari pergaulan masyarakat. c. Akses terhadap penyandang cacat yang sulit dijangkau karena kediaman, kemiskinan dan ketrampilan.
Anak Jalanan	
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> a. merupakan aset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. b. mempunyai potensi untuk bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal.
Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpendidikan rendah atau bahkan tidak sekolah b. Bimbingan, pendekatan psikososial c. Tidak memiliki orang dewasa / keluarga yang bisa merawat dan mendidik mereka.

Sedangkan untuk kendala dari PMKS ada pada tabel berikut.

Tabel 2. Kendala di Anak Terlantar, Usia Lanjut dan Gepeng

Kendala	
Anak Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya kesempatan bagi anak-anak miskin dan terlantar dari panti asuhan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. b. Kurangnya bangunan yang potensial pada anak-anak panti asuhan, sehingga kesulitan menghasilkan sumber daya manusia yang independen dan efektif untuk tenaga kerja. c. Kebiasaan panti asuhan untuk hanya menerima dan bergantung pada sumbangan dengan tidak ada pengembalian atau keuntungan untuk donor mereka dalam proses yang berdasarkan hak, harus timbal balik di alam.
Usia Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> a. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik usia lanjut yang masih potensial. b. Terbatasnya panti-panti tempat penampungan warga usia lanjut yang potensial.
Gelandangan, Pengemis dan Pemulung (Gepeng)	<ul style="list-style-type: none"> a. Di desa asal 'gepeng' sulit untuk mencari penghasilan (kondisi alam tidak mendukung dan lapangan pekerjaan lain tidak ada) sehingga mereka harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. b. Ada orang yang turut memberi peluang dan dorongan ke warga lain untuk meng 'gepeng' di kota. c. Sikap dari masyarakat kota yang suka memberi bila ada 'gepeng' datang mengunjungi rumahnya atau di tempat-tempat umum.



Tabel berikut ini menampilkan hasil diskusi mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi oleh PMKS secara umum.

Tabel 3. Peluang dan Ancaman PMKS

Peluang dan Ancaman PMKS	
Peluang	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya seluruh peraturan yang mengatur tentang keberadaan PMKS2. Adanya kepedulian dari masyarakat terhadap permasalahan kesejahteraan sosial3. Masih banyak warga PMKS yang memiliki potensi untuk dikembangkan4. Dukungan dari donatur sebagai sumber potensial untuk kesejahteraan sosial.5. Banyak perguruan tinggi yang bisa dilibatkan dalam penanganan PMKS6. Banyak lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak / memiliki perhatian di bidang penanganan masalah sosial.
Ancaman	<ol style="list-style-type: none">1. Tingginya dinamika dan mobilitas serta kompleksitas PMKS seiring dengan perkembangan permasalahan sosial sehingga pencapaian kinerja penanganan sosial seringkali tidak tampak / kelihatan.2. Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa permasalahan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah.3. Adanya anggapan dari sebagian lembaga / organisasi masyarakat bahwa permasalahan sosial merupakan isu sekunder yang dapat terselesaikan dengan sendirinya dan kurang populer.4. Anggaran pemerintah yang diperuntukkan program PMKS tidak sebanding dengan jumlah penyandang masalah sosial.5. Belum adanya sarana dan fasilitas umum bagi kelancaran mobilitas (khususnya bagi penyandang cacat) yang disediakan oleh pemerintah.6. Kurangnya kesempatan kerja bagi PMKS (terlebih khususnya penyandang cacat).

Model penanganan PMKS berawal dari fokus pada diri PMKS nya. Melalui model “*Self Advocacy and Empowering*”, peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian berupa kemampuan hidup secara normal dan bisa diterima masyarakat bisa diharapkan terjadi. PMKS yang terdiri atas keluarga miskin/fakir miskin, anak jalanan/pengamen, gelandangan/ pengemis, dan pekerja seks komersial (WTS/Waria) menjadi sasarannya. Dasar pemikiran yang diterapkan di sini adalah PMKS adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya, termasuk hak untuk hidup dan berpenghidupan serta untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Dan strateginya dengan cara memecahkan masalah dengan pendekatan

yang berbasis hak, dengan pelibatan secara aktif semua *stakeholder*, termasuk para penyandang masalahnya sendiri sebagai subyek utama program.

Model lain yang berfokus kepada kekuatan dan potensi masyarakat termasuk organisasi sosial dan kelompok warga peduli (wali) dan sasarannya adalah RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, organisasi sosial dan keagamaan seperti pengajian dan organisasi formal seperti PKK, karang taruna adalah model “*Community Based Information Network*”. Tentu model ini mengakui bahwa tiap komunitas memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan memiliki sumber-sumber yang bisa dibagi. Percepatan yang bisa dilakukan yaitu dengan melibatkan secara aktif semua *stakeholder* yang ada di masyarakat sebagai penunjang utama program.

Model penanganan PMKS dengan melibatkan aparat pemerintah dan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dan bersinggungan dengan aktivitas PMKS seperti RT/RW, Camat, PJKA, Kepolisian, Dinas Pertamanan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kimpraswil, KUKM, dan instansi lain yang selama ini telah dilakukan ternyata memiliki sisi kelemahan. Hubungan kerja yang komprehensif, sinergis, terintegrasi dan lintas sektor yang melibatkan banyak pihak dari antar instansi terkait justru ditinggalkan. Kunci utamanya pada pelibatan secara aktif semua *stakeholder* yang ada sebagai pelaksana utama program dengan pendekatan berbasis *good governance*.

Lembaga lain seperti pusat-pusat studi, lembaga pengabdian masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya seperti forum/asosiasi atau kelompok alumni dari perguruan tinggi termasuk di dalam model pelibatan seluruh unsur masyarakat dalam pengentasan PMKS. Hasil penelitian menjadi dasar terlibatnya perguruan tinggi dalam mengabdikan dirinya pada masyarakat.

Pendekatan yang berbasis kesetiakawanan dan pelayanan sosial yang menjadi isu yang paling gencar dari pihak swasta, BUMN dan LSM logis diterapkan dengan dasar pemikiran adanya kepemilikan modal berupa kapital/lapangan kerja dari para pengusaha tersebut. Teknik penanganan PMKS adalah Bimbingan Rehabilitasi, Metode Bimbingan Konseling, Bimbingan Sosial Individu, Bimbingan Sosial Kelompok, Bimbingan Sosial Masyarakat, Metode Asesemen Psiko Sosial, Metode Bimbingan Rujukan serta Metode Bimbingan Advokasi. Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk



menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah kesejahteraan sosial bisa diselesaikan melalui berbagai model dengan memperhatikan potensi yang dimiliki dari warga penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pelibatan warga dan lembaga pada pengentasan warga PMKS dilakukan dengan dasar adanya tanggung jawab dan dengan teknik sinergitas dan berkesinambungan.

Rekomendasi yang diusulkan adalah melakukan penanganan PMKS dengan mengikutkan pentahelix, yaitu antara pemerintah, Perguruan Tinggi, industri, LSM dan warga masyarakat. Kemudian Pemerintah perlu menganggarkan dana kebutuhan PMKS terutama pada faktor pendidikan dengan menyusun program pendidikan informal yang akan meningkat kualitas mental sekaligus ketrampilan bagi kelompok warga PMKS yang memiliki kelemahan dalam hal motivasi dan tanggungjawab. Perlu ada pemikiran untuk menyusun program dengan melibatkan warga PMKS dengan golongan umur yang sama dengan pertimbangan warga PMKS akan memperoleh contoh atau figur ketika mereka mengetahui bahwa ada orang dengan kondisi yang terbatas dan lemah yang mampu atau berhasil keluar dari permasalahannya.

DAFTAR REFERENSI

1. Asyhari, F., & Handoyo, P. (2016). Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam Mengatasi PMKS. *Paradigma*, 4(3), 1–6.
2. Azis Prasetyo, R., Ariadi, S., Suyanto, B., Hannan, A., Yunike Putri, R., Sosiologi, D., Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam Surabaya, U., & Timur, J. (2022). *Tekanan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Masa Pandemi di Kabupaten Gresik*. 7(2), 12–26. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/>
3. Danziger, S. H., & Haveman, R. H. (2000). Understanding poverty: Progress and problems. *Focus*, 21(2). <http://www.irp.wisc.edu/publications/focus/pdfs/foc212.pdf>
4. DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH. (2021). *Buku Sebaran Data Ppks & Psks Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021*. 12.
5. Lamaya, F. F. L., & Kiwang, A. S. (2021). Studi Pemberdayaan Perempuan (Pemulung) Rawan Sosial Ekonomi di TPA Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(1), 221–231. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i1.316>
6. Nur Handayani, M. Maruf, G. A. Am. (2019). Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal*

- Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(1), 1–11.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/download/844/531>
7. Nurhaeni, N. (2020). Klasifikasi Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menggunakan Naïve Bayes. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 6(1), 54–61.
<https://doi.org/10.34128/jsi.v6i1.205>
 8. Nuriana, R. (2017). Pemberdayaan “ Pmks ” (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Lansia Terlantar Di Uptd Griya Werdha Kota Surabaya. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, 1*, 1–8.
 9. Purnama, A. (2019). Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(4), 319–328.
 10. Rasyid, R., Dirawan, G. D., Umar, R., & Pertiwi, N. (2018). Problem and solution of poverty household in Makassar City, Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(6), 1–7.